

© 2003 G o l a r  
Science Philosophy (PPs 702)  
Graduate Program / S3  
Institut Pertanian Bogor  
October 2003

Posted 6 October, 2003

Instructors:  
Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng (Principal)  
Prof Dr Ir Zahrial Coto  
Dr Bambang Purwantara

## **STRATEGI PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (PMDH) DI AREAL HPH PT. DWIHUTANI FITRIBHAKTI, SUL-TENG**

**Oleh:**

***G o l a r***<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

This research aims to identify of participation by the forest community in an attempt to formulate the strategy for “PMDH”. The study was conducted at Labuan Kungguma district of Donggala Regency, Central Sulawesi, Indonesia, from March to July 2001. The data were analyzed with “*analisis peran*” and *SWOT*, an analysis involving classification by internal and external factors. The results of the study indicated that the forest community participations in the PMDH programs were low, with unskilled labour, and problems related to institution aspects and socialization - and their felt needs do not well accomodated. It can be concluded from the study that: reformulated strategy for PMDH with the full participation (*urun rembug*) of the stakeholders (*community, government, and company*); improving human capabilities involeved in the management of this program.

*Key word: Forest community development, SWOT Analysis, internal and external factors, Felt needs*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor pada Prog. Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK)

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat sekitar hutan seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat, termasuk pola kehidupan dan mata pencahariannya.

Masyarakat umumnya menghadapi masalah kemiskinan dengan pertanian sebagai basis ekonominya. Pola usaha tani yang bersifat ekstensif dan cenderung subsisten, tingkat pendapatan yang rendah serta minimnya sarana dan prasarana, menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan.

Sebenarnya pemerintah telah mengupayakan berbagai cara guna mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutanan No. 523/KPTS-II/1997 tentang pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH). Melalui SK tersebut pemegang HPH diwajibkan untuk mendistribusikan sebagian keuntungan dari kegiatan pengusahaan hutan guna pengembangan masyarakat lokal di sekitar areal konsesi. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat sejahtera, mandiri dan sadar lingkungan. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh peningkatan pendapatan, terciptanya kesempatan kerja serta timbulnya ekonomi pedesaan yang berwawasan lingkungan. Namun, hingga saat ini hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu hal yang menghambat keberhasilan kegiatan PMDH adalah kurang optimalnya peranserta masyarakat desa binaan, di mana mereka kurang dilibatkan secara aktif dalam berbagai aspek kegiatan. Ada dua hal yang selama ini dianggap mendasari hal itu. *Pertama*, masyarakat cenderung dijadikan objek saja dan kurang terlibat dalam merumuskan rencana serta penyusunan kebijakan. *Kedua*, dalam penerapan kebijakan, masyarakat hanya sebagai orang yang menerima bukan sebagai pelaku dan pelaksana, sehingga acapkali kebijakan kurang dipahami dan kurang

dapat diterima oleh masyarakat. Hal inilah yang memicu lahirnya “*partisipasi semu*” dengan motif yang beragam (karena upah atau maksud tertentu semata). (Soetrisno, 1995)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan serta memformulasikan strategi PMDH.

## II. METODE DAN INSTRUMEN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Labuan Kungguma, dengan objek penelitian adalah kelompok masyarakat peserta PMDH PT. Dwihutani Fitrihakti. Pemilihan lokasi didasarkan pertimbangan bahwa, di desa tersebutlah berdasarkan Rencana Karya Tahunan (RKT) 2001/2002 dilaksanakan kegiatan PMDH. Penelitian berlangsung selama tiga bulan dan dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2002.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer pada pokoknya adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Data sekunder pada umumnya menyangkut keadaan umum lokasi serta kondisi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat yang diperoleh melalui laporan studi diagnostik pihak perusahaan, data monografi desa serta sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. .

Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan penetapan jumlah sampel responden dilakukan secara *purposive* (sengaja) sebanyak 30 KK. Kriteria masyarakat yang dipilih sebagai sampel adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta PMDH, serta dilibatkan dalam proses penyusunan rencana kegiatan. Untuk memudahkan proses pengumpulan data, digunakan instrumen penelitian berupa questioner dan pedoman wawancara.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana PMDH digunakan “*analisis peran*”. (Slamet, 1989) Langkah-langkah penyusunan analisis peran dilakukan melalui pengelompokan masing-masing tipe responden (aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum). Setelah itu, hasil yang diperoleh digabungkan dalam bentuk tabel analisis peran kolaboratif. Melalui tabel analisis tersebut akan diamati kecenderungan persentase jawaban tiap item pertanyaan untuk masing-masing tipe responden sebagai landasan dalam menganalisis.

Penyusunan strategi PMDH dilakukan melalui pendekatan *SWOT* dengan cara mengelompokkan faktor-faktor *internal* (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor *eksternal* (peluang dan ancaman) (Salusu, 1997). Analisis SWOT mengkaji dan menganalisis potensi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat desa binaan di lokasi penelitian, sesuai dengan kondisi faktual dalam proses penyusunan rencana pelaksanaan PMDH.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana PMDH**

Keterlibatan (*partisipasi*) masyarakat dalam penyusunan rencana PMDH sangatlah diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar program selaras dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini dapat ditunjukkan dari tingkat partisipasi pada tahapan perencanaan yang dilakukan.

Indikator yang digunakan antara lain seberapa besar peranan pimpinan informal (kepala adat, ulama, tokoh masyarakat), aparat pemerintah lokal, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Tani Menetap (KANITAP) dalam proses penyusunan rencana PMDH. Di Desa Labuan Kungguma, penetapan rencana didasarkan pada hasil “*pertemuan*” yang diprakarsai oleh PT. Dwihutani Fitrihakti.

Untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan kegiatan penyusunan rencana dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel.1** Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kegiatan PMDH

Unsur-Unsur Partisipasi pada Tahap Perencanaan	Jumlah responden yang menyatakan (N=25)			
	Ya		Tidak	
	F	%	F	%
1. Mengajukan usul/pendapat tentang jenis bantuan/pembinaan yang dibutuhkan	7	28	18	72
2. Ikut menentukan prioritas jenis bantuan/pembinaan yang akan dilaksanakan	7	28	18	72
3. Diberitahukan tentang rencana pertemuan untuk membahas program PMDH yang akan dilaksanakan oleh perusahaan	25	100	0	0
4. Diajak untuk ikut serta menyepakati jenis bantuan/pembinaan yang terpilih	25	100	0	0

*Sumber : Data primer setelah diolah 2001*

Keterangan: F = Frekwensi  
% = Persentase

Cavin dalam Slamet (1989), unsur-unsur partisipasi nomor 1 dan 2 dalam tahap perencanaan pada Tabel 1 di atas (pengajuan usul/pendapat dan prioritas/pembinaan bantuan) merupakan unsur yang paling berpengaruh dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Pada umumnya (72%) responden tidak terlibat pada proses pengajuan usul/pendapat dan prioritas bantuan/pembinaan, sehingga tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih relatif rendah. Dalam proses penyusunan rencana tersebut, aparat desa dan tokoh masyarakatlah yang memegang peranan dalam penentuan jenis bantuan serta penetapan prioritas bantuan. Sedangkan, kelompok masyarakat hanya ikut dalam proses penyepakatan hasil (*tidak berpartisipasi aktif*).

Kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi masyarakat tentang tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan PMDH terbatas pada manfaat berupa

bantuan keuangan dan fisik semata. Padahal, tujuan PMDH yang sesungguhnya mencakup upaya peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, maupun pemasaran hasil-hasil pertanian masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Simon (1994), munculnya persepsi seperti itu disebabkan proses pensosialisasian rencana kegiatan yang dilakukan pihak perusahaan tidak berjalan dengan baik. Padahal, tahapan inilah yang seharusnya lebih diutamakan sebelum dilakukan penyusunan rencana kegiatan PMDH.

### 3.2. Strategi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan

Untuk merumuskan strategi PMDH di lokasi penelitian digunakan analisis *S-W-O-T*. Analisis ini akan mengelompokkan faktor-faktor *internal* (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor *eksternal* (peluang dan ancaman) yang merupakan dasar pemikiran alternatif pengembangan PMDH, yang akan dikaji dan dianalisis dengan melihat potensi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat desa binaan. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut

**Tabel. 2** Matrik Analisis SWOT Strategi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)

	<b>Eksternal</b>	<b>Peluang (O)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dana PMDH dari perusahaan</li> <li>• Kebijakan otonomi daerah</li> <li>• Kebijakan pemerintah tentang kewajiban PMDH bagi pengusaha HPH</li> </ul>	<b>Ancaman (T)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancaman banjir yang cukup serius</li> <li>• Pensosialisasian SK Menhut pasal 7 No. 523/Kpts-II/1997 dalam penyusunan rencana masih rendah</li> </ul>
		<b>Strategi S – O</b>	<b>Strategi S – T</b>
	<b>Kekuatan (S)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya alam yang dikelola masyarakat memadai</li> <li>• Tersedianya mterial galian C</li> <li>• Tersedianya tenaga kerja yang prduktif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Meningkatkan keterampilan masyarakat sekitar hutan</i></li> <li>• <i>Melatih tenaga kerja yang masih kurang terampil</i></li> <li>• <i>Memberdayakan masyarakat di sekitar hutan dalam kegiatan pengolahan hutan</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Membangun DAM penahan banjir dengan memanfaatkan material galian C</i></li> </ul>

	Strategi W – O	Strategi W – T
<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi pelaksana PMDH belum ada</li> <li>• Alokasi dana tidak proporsional untuk setiap kegiatan</li> <li>• Pemasaran hasil tani masyarakat masih belum baik</li> <li>• Masyarakat belum memahami sasaran dan tujuan PMDH</li> <li>• Tingkat partisipasi masyarakat masih rendah</li> <li>• Tenaga kerja di areal HPH tidak terampil</li> <li>• Pengawasan Pemda masih kurang (belum banyak terlibat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mengalokasikan dana PMDH secara proporsional untuk setiap kegiatan</i></li> <li>• <i>Melakukan sosialisasi program PMDH kepada masyarakat</i></li> <li>• <i>Menciptakan peluang pasar untuk memasarkan hasil tani masyarakat</i></li> <li>• <i>Melibatkan Pemda dalam melakukan pengawasan PMDH pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan</i></li> <li>• <i>Melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemda dan HPH</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Membentuk organisasi PMDH yang mandiri</i></li> </ul>

*Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2001*

**a. Strategi Kekuatan – Peluang (S – O)**

Data keadaan umum lokasi menunjukkan bahwa potensi sumberdaya alam Desa Labuan Kungguma sangat potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraannya. Namun, hingga saat ini masyarakat langsung menjual hasilnya tanpa mengolah terlebih dahulu. Kondisi ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan.

Hasil kebun yang dimiliki oleh masyarakat Desa Labuan Kungguma antara lain: coklat, kelapa, jambu mete, dan kapok randu. Melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki tersebut, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan kaitannya dengan pengolahan lanjutan hasil kebun mereka, yakni: pelatihan teknik pembuatan *kasur, pembuatan kecap dan brikat arang*.

Strategi yang dapat diupayakan adalah peningkatan keterampilan masyarakat sekitar hutan melalui pelatihan tenaga kerja yang masih kurang terampil dan memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pengolahan hutan.

***b. Strategi Kekuatan – Ancaman (S – T)***

Keluhan masyarakat desa akan ancaman bahaya banjir merupakan permasalahan serius yang harus dicarikan pemecahannya oleh perusahaan. Hal ini mengingat dampak yang dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi (*eksternalitas effect*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Strategi yang dapat diupayakan adalah melalui pemanfaatan bahan galian C (batu kali) yang telah tersedia sebagai bahan baku utama pembuatan DAM penahan air, dengan melibatkan peran aktif masyarakat desa.

***c. Strategi Peluang – Kelemahan (O – W)***

Berdasarkan hasil kesepakatan rencana kegiatan PMDH yang akan dilakukan, nampak jelas adanya ketidak-seimbangan pengalokasian dana. Dalam hal ini, lebih terfokus pada bantuan fisik semata, sementara sasaran pembinaan lainnya “*kurang tersentuh*”. Kondisi ini disebabkan studi diagnostik belum ada dan masih lemahnya mekanisme pengawasan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan serta tidak tersosialisasikannya dengan baik sasaran dan tujuan PMDH.

Strategi yang dapat ditempuh antara lain; memproporsikan kembali dana bantuan, utamanya terhadap pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan desa melalui penciptaan peluang pasar dalam memasarkan hasil buminya. Untuk

mewujudkan hal tersebut, pihak perusahaan dalam penyusunan program PMDH harus terencana dengan baik. Selain itu, prioritas bantuan harus mengutamakan jenis kegiatan yang berbasis pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pensosialisasian kembali sasaran dan tujuan PMDH, serta penciptaan mekanisme pengawasan melalui pelibatan secara aktif peran serta pemerintah daerah (PEMDA) dan masyarakat desa pada setiap tahapan kegiatan PMDH.

#### ***d. Strategi Kelemahan – Ancaman (W - T)***

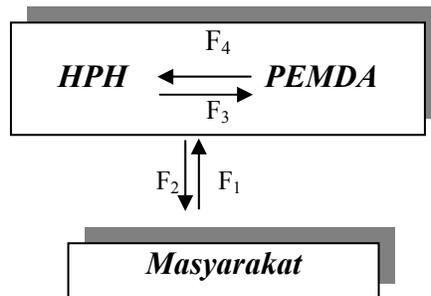
Surat Keputusan Menteri Kehutanan, pasal 7 Nomor 523/Kpts-II/1997 tentang PMDH, menegaskan bahwa setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan PMDH harus menyusun organisasi pengelolaannya sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. PT Dwihutani Fitri Bakti, hingga saat ini belum memiliki organisasi yang khusus menangani kegiatan PMDH.

Strategi yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan adalah melalui pembentukan organisasi yang secara khusus menangani PMDH. Anggota yang akan direkrut harus dibekali dengan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, sehingga dalam proses penyusunan rencana dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

### **3.3. Strategi Operasional PMDH**

Berdasarkan dari keempat uraian strategi matriks SWOT, maka dibuat suatu strategi operasional yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yang berkaitan dengan pola interaksi antara HPH, masyarakat dan

Pemerintah daerah. Hubungan antara tiga komponen tersebut dapat dilihat pada bagan alir berikut.



Gambar 1. Strategi Operasional PMDH

**Keterangan :**

- F<sub>1</sub> : • Pembinaan masyarakat desa  
 • Pemberdayaan masyarakat desa  
 • Peningkatan pendapatan masyarakat  
 • Pembangunan infrastruktur  
 • Pemberian bantuan kepada masyarakat
- F<sub>2</sub> : • Peningkatan pendapatan bagi HPH dan Pemda  
 • Pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan  
 • Partisipasi dalam kegiatan PMDH
- F<sub>3</sub> : • Peningkatan pendapatan daerah
- F<sub>4</sub> : • Pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan  
 • Pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan

Pemerintah daerah (Pemda) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan oleh perusahaan mulai dari kegiatan perencanaan sampai monitoring evaluasi, pengelolaan keuangan tentang pajak, alokasi dana produksi, keuntungan usaha, serta alokasi dana sosial. Di pihak lain, perusahaan (HPH) sebagai pengelola hutan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui hasil hutan. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, pihak perusahaan bekerjasama dengan Pemda melakukan pembinaan kepada masyarakat berupa peningkatan hasil

produksi sumberdaya alam melalui pelatihan dan penyuluhan pertanian, memberdayakan masyarakat setempat (mengikutsertakan dalam kegiatan koperasi desa) dan memberdayakan melalui pemberian bantuan (*fisik dan non-fisik*) kepada masyarakat serta melakukan pembangunan infrastruktur desa berupa pembuatan jalan desa, pembangunan sarana ibadah dan sarana pendidikan.

Masyarakat desa hutan dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan dan Pemda melalui pengelolaan sumberdaya alam yang memadai dan melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan hutan serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan PMDH mulai dari tahap perencanaan hingga pendistribusian hasil.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Beberapa kesimpulan terpenting dari penelitian ini adalah.

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan PMDH masih rendah, sehingga rencana program yang tersusun tidak mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dengan baik.
2. Faktor penghambat penyusunan rencana PMDH antara lain, belum dibentuknya organisasi pelaksana, proses pensosialisasian yang kurang mantap, kurangnya mekanisme kontrol, serta belum dipersiapkannya dengan baik sumber daya manusia yang akan menangani PMDH.
3. Strategi yang dapat diupayakan adalah melakukan pensosialisian kembali tujuan dan sasaran pembinaan yang sebenarnya, secepatnya membentuk organisasi pelaksana, meningkatkan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan melalui pelibatan peran aktif Pemda dan masyarakat desa, serta memprakondisikan sumber daya manusia yang akan menangani PMDH.

## **B. Saran**

Dalam upaya perbaikan penyusunan rencana PMDH, pihak perusahaan harus melibatkan partisipasi aktif seluruh lembaga masyarakat, melalui mekanisme terbuka (*dilibatkan pada setiap tahapan perencanaan*) sehingga hasil yang diperoleh dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat desa, dan bukan kepentingan sekelompok masyarakat.

Selain itu, penyiapan sumberdaya perusahaan yang akan menangani masalah PMDH amat penting diperhatikan, sehingga kedepannya, pelaksanaan kegiatan bukan lagi sekedar persyaratan administrasi semata, melainkan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat setempat.

Memberdayakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lokal, melalui upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pengalokasian dana bantuan terhadap pengembangan sarana dan prasarana usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Conyer, D. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga* Gadjah Mada University Press.
- Fujo, 1998. *Upaya Pengembangan HPH Bina Desa pada PT. Kiani Lestari Kabupaten Kutai*. Universitas Winaya Mukti.
- Golar, 1999 *Perencanaan Partisipatif Masyarakat dalam Pembangunan Sektor Kehutanan (studi kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Dati II Gowa)* (Tesis S2) Universitas Hasanuddin Ujung Pandang
- Mubyarto, dkk. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Aditya Media Yogyakarta.
- Oakley Peter, 1991. *Projects With People, The Practice of Participation in Rural Development*. International Labour Office, Geneva.

- O. Kreimer, The Future Inter-American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Challenge for the Americas. In: C. Price Cohen (ed.), ***Human Rights of Indigenous Peoples***, Transnational Publishers: Ardeley, New York, 1998, 69-70.
- Rangkuti, 1997. ***Teknik Membedah Kasus (Pendekatan Analisis SWOT)***, Gramedia. Jakarta
- Salusu, J., 1997. ***Pengambilan Keputusan Strategik***, untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Rasindo, Jakarta.
- Simon, H. 1994. ***Hutan Jati dan Kemakmuran*** Aditya Media. Yogyakarta.
- Slamet, Y. 1989. ***Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial***. Proyek Pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas – PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soetrisno, L. 1995. ***Menuju Masyarakat partisipatif***. Kanisius, Jakarta.
- WWF Statement of principles: indigenous peoples and conservation***. Gland, WorldWide Fund for Nature International, 1996.